

KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Kota Serang)

Sev Rahmiyanti¹, Ajeng Muhayani Ihdina², Nizar Ahwaz Saputra³

Universitas Banten Jaya¹, Universitas Banten Jaya²

ajengmuhayani055@gmail.com¹, nizarsaputta@gmail.com

Abstrak

Kinerja keuangan Bank Syariah merupakan gambaran kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek pengumpulan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas Bank Syariah yang diukur menggunakan RGEC namun juga dinilai berdasarkan kesesuaiannya Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Deskriptif dengan mengambil 5 sampel Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika diukur menggunakan RGEC, diukur menggunakan Maqashid Syariah Indeks, 5 Bank Umum Syariah di Indonesia mendapatkan predikat Sehat

Kata kunci: kinerja keuangan, Bank Syariah, RGEC, Maqashid Syariah Indeks

PENDAHULUAN

Bank dikenal sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposit, bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu juga, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah, yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga,

sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk yang ditawarkan tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan pada nasabahnya.

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari pengembangan sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API).⁶ API pada dasarnya merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.⁷ Arah kebijakan pengembangan industri perbankan sebagaimana dirumuskan dalam API dilandasi oleh sebuah visi untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁸

pada tanggal tahun 2011 Bank Indonesia membuat instrumen penilaian tingkat kesehatan bank yang secara spesifik membahas kesehatan bank dengan pendekatan risiko RBBR (Risk-based Bank Rating) menggunakan aspek RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital), yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 5 Oktober 2011 (Susanto dkk, 2016). BI menginginkan bank-bank di Indonesia mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini dan melakukan evaluasi manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih kuat dalam menghadapi krisis, serta menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas saja namun juga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Sebagai sebuah lembaga bisnis bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pendirian bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian maqashid syariah. Dalam praktiknya

pengukuran kinerja perbankan syariah hanya menggunakan metode RGEC padahal dalam praktiknya metode ini mengalami banyak kekurangan apabila diterapkan di perbankan Syariah
Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah

1. Al-wadi'ah(simpanan)

al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

Dalam praktiknya nasabah antara bank (shahibul maal) dengan deposan (mudharib) berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40:60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45:55 untuk simpanan deposito.

Contoh keuntungan tabungan mudharabah

Tn. Armi arup memiliki tabungan di bank syariah tanjung pandan pada bulan juni 2003 saldo rata-rata tabungan tn. Armi arup adalah sebesar Rp 1.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank syariah tanjung pandan dengan deposan adalah 40:60 saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh bank syariah tanjung pandan adalah Rp 5.000.000.000,-. Kemudian pendapatan bank syariah tanjung pandan yang dibagihasilkan adalah Rp800.000.000,-.

Pernyataan :

Berapa keuntungan Tn.Armi Arup pada bulan yang bersangkutan

Jawab:

$$\text{Keuntungan Tn.Armi Arup} = \frac{\text{Rp 1.000.000,-}}{\text{Rp 5.000.000.000}} \times \text{Rp.800.000.000} \times 60\% = \text{Rp.96.000}$$

(sebelum dipotong pajak)

2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang diperbankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil

Pengembangan sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API pada dasarnya merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri

perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan sebagaimana dirumuskan dalam API dilandasi oleh sebuah visi untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis Kinerja Keuangan

Bank Menurut Lukman (2009: 114-122), untuk menganalisis kinerja suatu bank adalah sebagai berikut:

a) Analisis rasio likuiditas Rasio Likuiditas adalah analisis rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja bank antara lain adalah:

- 1) Cash Ratio
- 2) Reserve Requirement
- 3) Loan to Deposit Ratio (LDR)
- 4) Loan to Asset Ratio
- 5) Rasio Kewajiban Bersih Call Money

b) Analisis Rasio Rentabilitas Analisis rasio rentabilitas adalah alat menganalisis dan mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu bank. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Analisis rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengukur suatu bank antara lain sebagai berikut:

- 1) Return on Assets (ROA)
- 2) Return on Equity (ROE)
- 3) Rasio Maya (Beban) Operasional
- 4) Net Profit Margin (NPM)

c) Analisis Rasio Solvabilitas Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas bank. Selain itu rasio ini

dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah dana yang diperoleh dari utang baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dan tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Beberapa rasio yang diuraikan antara lain :

- 1) Capital Adequacy Ratio (CAR)
- 2) Debt to Equity Ratio
- 3) Long Term Debt to Assets Ratio

Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Penilaian Kesehatan Bank, dilakukan untuk Bank Konvensional, juga dilakukan untuk Bank Syariah baik untuk Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hal ini dilakukan disesuaikan dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan prinsip syariah. tujuannya adalah agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang

Penilaian Kesehatan Bank Syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat Kesehatan Bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank umum syariah melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank secara triwulan, yang meliputi faktor-faktor antara lain :

1. Permodalan (capital)
2. Kualitas aset (asset quality)
3. Rentabilitas (earning)
4. Likuiditas (liquidity)
5. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk)
6. Dan manajemen (management)

Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor finansial (permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar) dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur *judgment*.

Untuk menentukan peringkat komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan Bank ditetapkan sebagai berikut:

No.	Peringkat	Keterangan
1.	Komposit 1	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
2.	Komposit 2	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
3.	Komposit 3	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
4.	Komposit 4	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik
5.	Komposit 5	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik

Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham untuk menyampaikan rencana Tindakan (action plan) apabila hasil penilaian tingkat kesehatan BPRS menunjukkan :

1. Satu atau lebih faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas memiliki peringkat 4 atau 5
2. Faktor manajemen memiliki peringkat C atau D; dan/atau
3. Memiliki peringkat komposit 4 atau 5

Tabel 1: Bobot tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Bobot	Keterangan
1	86-100	Sangat sehat
2	71-85	Sehat
3	61-70	Cukup sehat
4	41-60	Kurang sehat
5	<40	Tidak sehat

Sumber: Refmasari dan Setiawan

Metode RGEC

a. Profil Risiko (Risk Profile) Penilaian profil resiko atau risk merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian terhadap risiko (risk profile) meliputi penilaian terhadap Risiko Kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada bank rasio ini dirumuskan oleh NPF sedangkan Risiko Likuiditas merefleksikan kemampuan suatu bank untuk memenuhi permintaan dana pinjaman dan investasi rasio ini dirumuskan oleh FDR

b. Good Corporate Governance (GCG) Syakhroza (2003), mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi

c. Rentabilitas (Earning) Penilaian faktor rentabilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas ROA: ROA adalah salah satu indikator profitabilitas dari kinerja keuangan. Rasio Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan ROE: Return on Equity merupakan rasio antara laba setelah pajak atau earning after tax (EAT) terhadap total modal sendiri yang berasal dari setoran modal pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan

d. Permodalan (Capital) Penilaian atas faktor Permodalan berdasarkan rentabilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio (CAR).

Magashid Syariah Index

Magashid syariah index merupakan sebuah alternative model pengukuran kinerja bagi perbankan syariah yang pada umumnya menggunakan rasio profitabilitas semacam ROA, ROE atau ROI sebagai alat kinerja keuangan. Penilaian kinerja perbankan syariah masa kini cenderung memprioritaskan aspek pencapaian laba (ekonomi), dan terkadang melupakan prioritasnya dalam memenuhi fungsi sosial (masalah) nya

LANDASAN TEORI

Kinerja keuangan

(Jumingan 2006:239) Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar

Menurut kasmir kinerja keuangan bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila bank tersebut buruk maka tidak mungkin para direksi ini diganti. Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut manawir sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat di tagih
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat retabilitas dan profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yaitu diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhinya (baik yang nyata maupun yang dipersepsikan) mengancam posisi keuangan atau keberadaannya

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).

Handono Mardiyanto dalam bukunya Inti Sari Manajemen Keuangan (2009), menyebut likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan.

likuiditas perbankan adalah kewajiban bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek maka likuiditas mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank, sebab likuiditas diperlukan antara lain untuk:

1. Pemenuhan aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral.
2. Penarikan dana oleh deposan.
3. Penarikan dana oleh debitur.
4. Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), [link ke metadata SEKI-IHK](#). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Pengukuran IHK

Berdasarkan the *Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), IHK dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Bahan Makanan.
2. Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau.
3. Perumahan.
4. Sandang.
5. Kesehatan.
6. Pendidikan dan Olahraga.
7. Transportasi dan Komunikasi.

Data pengelompokan tersebut didapatkan melalui Survei Biaya Hidup (SBH)

Disagregasi Inflasi

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:

- Interaksi permintaan-penawaran.
- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang.
- Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

2. Inflasi non-Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari:

- Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
- Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh Pemerintah (*Administered Prices*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*.

Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Pentingnya Kestabilan Harga

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. **Pertama**, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, miskin **Kedua**, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku

ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. **Ketiga**, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.

Keempat, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan SSK (referensi).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif karena dapat digunakan untuk menjelaskan rasio RGEC dalam menganalisis kinerja Bank Umum Syariah dan dapat menjelaskan rasio Maqashid Syariah Indeks dalam menganalisis kinerja Bank Umum Syariah

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi 14 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia sedangkan Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah.

Pengukuran Variabel RGEC

1. NPF: $\text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan} \times 100\%$
2. FDR: $\text{Total Pembiayaan} / \text{Total Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$
3. GCG (Berdasarkan selfassessment bank)
4. ROA: $\text{Laba Sebelum Pajak} / \text{Total Aset} \times 100\%$
5. ROE: $\text{Laba Setelah Pajak} / \text{Modal Sendiri} \times 100\%$
6. CAR: $\text{Modal} / \text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko} \times 100\%$

Pengukuran Maqashid Syariah Indeks

Tabel 2 Pembobotan Maqashid Syariah Indeks

Tujuan	Rata-rata pembobotan 100%	Unsur-unsur	Rata-rata pembobotan
01. Pendidikan	30	E1 Hibah Pendidikan/donasi	24
		E2 Penelitian	27
		E3 Pelatihan	26
		E4 Publisitas	23
		Total	100
02. Keadilan	41	E5 Pengembalian yang adil	30
		E6 Harga Produk terjangkau	32
		E7 Produk non bunga	38
		Total	100
03. Kesejahteraan	29	E8 Rasio laba bank	33
		E9 Transfer pendapatan	30
		E10 Rasio Investasi ke sector rill	37
		Total	100

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Akhir RGEC

Bank Umum Syariah	Nilai Komposit	Hasil Akhir Predikat	Hasil Akhir Pk
1. Bank Mandiri Syariah	76,6	2	Sehat
2. Bank Mega Syariah	80	2	Sehat
3. Bank BNI Syariah	80	2	Sehat
4. Bank BRI Syariah	66,6	3	Cukup Sehat
5. Bank BCA Syariah	76,6	2	Sehat

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2020

Bank Mega Syariah dan BNI Syariah memiliki nilai komposit sebesar 80 dengan predikat SEHAT, selanjutnya Bank Mandiri Syariah dan Bank BCA Syariah memperoleh nilai

komposit 76,6 dengan predikat SEHAT dan yang terakhir Bank BRI Syariah memperoleh nilai komposit sebesar 66,6 dengan predikat CUKUP SEHAT

Tabel 4 Hasil Maqashid Syariah Indeks 5 Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	T1 (Mendidik Individu)	T2 (Mewujudkan Keadilan)	T3 (Kepentingan Bersama)	MSI	Peringkat
				T1+T2 +T3	
1.Bank Mandiri Syariah	0,0051	0,1291	0,2699	0,4041	2
2.Bank Mega Syariah	0,0012	0,0597	0,2309	0,2918	5
3.Bank BNI Syariah	0,0175	0,0959	0,2563	0,3697	4
4.Bank BRI Syariah	0,0062	0,1486	0,2154	0,3702	3
5.Bank BCA Syariah	0,0050	0,2164	0,2314	0,4528	1

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti,2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan Maqashid Syariah Indeks selama periode 2016-2018 yaitu mencapai 45,28% dan diurutan kedua ada Bank Syariah Mandiri mencapai 40,41% diurutan ketiga ada Bank BRI Syariah mencapai 37,02% dan Bank BNI Syariah mencapai 36,97% dan diurutan terakhir Bank Mega Syariah yang mencapai 29,18%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan yang dilakukan sebelumnya secara umum menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh pranata hukum yang memadai baik dari aspek legalitas hukum nasional, hukum Islam, maupun dukungan peraturan pendukung operasionalnya.

Hasil analisa RGEC data yang digunakan dalam paparan diatas menunjukkan bahwa bank umum syariah mengalami fluktuatif disetiap rasionya.Bank Mega Syariah dan BNI Syariah memiliki nilai komposit sehat, sedangkan Bank Mandiri Syariah dan Bank BCA Syariah memperoleh nilai komposit sehat dan Bank BRI Syariah memperoleh nilai komposit cukup sehat.

Kinerja 5 Bank Umum Syariah di Indonesia jika diukur menggunakan Maqashid Syariah Indeks Bank BCA Syariah berada pada peringkat pertama Bank Mandiri Syariah berada pada peringkat kedua Bank BRI Syariah berada pada peringkat ketiga, Bank BNI Syariah berada pada peringkat keempat dan Bank Mega Syariah berada pada peringkat kelima dengan perolehan kinerja tujuan pertama dan kinerja tujuan kedua terendah. Maqashid Syariah di Indonesia belum bisa dijadikan tolak ukur kesyariahan suatu Bank Umum Syariah, karena pada pelaksanaannya banyak Bank Umum Syariah yang belum mempublish rasio rasio keuangan yang digunakan dalam Maqashid Syariah Indeks dalam laporan keuangannya. Hal ini menjadikan Maqashid Syariah Indeks sebagai upaya untuk Bank Umum Syariah bersikap jujur dan transparan terhadap system dan produk produk syariah yang digunakan.

Perbankan syariah juga telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekkan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya.

Saran

1. Bank Umum Syariah (BUS) terutama dalam transparansi laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan dan metode perhitungannya harus dibuatkan standar khusus agar informasi yang disampaikan jelas dan akurat
2. Bank Indonesia dan OJK selaku lembaga intermediasi diharapkan mengeluarkan peraturan yang ketat mengenai publikasi rasio maqashid syariah indeks pada laporan keuangan di setiap bank syariah. Sehingga memudahkan para pembaca dalam melihat nilai tujuan syariah dan memudahkan penelitian mengenai nilai maqashid syariah indeks pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Kasmir, 2014 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya

Dea Chintia, 2020 Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Yuli Andriansyah, 2009 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional

Rudi Setiyobono¹, Nurmala Ahmar², Darmansyah³ Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah